



**SUMBER BERITA**

**RABU, 27 JUNI 2018**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Utang Proyek Rp 17,2 M Belum Tuntas**

**Tunggu  
Pemeriksaan BPK**

**KOTA MANNA** - Polemik utang proyek senilai Rp 17,2 miliar tahun 2017 belum juga tuntas. Kontraktor sampai saat ini belum menerima pembayaran atas pekerjaan paket proyek yang anggaran awalnya

dari bantuan keuangan provinsi. Sementara Pemkab Bengkulu Selatan (BS) masih akan berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait penganggaran.

"Tergantung hasil pemeriksaan BPK. Uang siapa kabupaten atau provinsi?" ujar Sekda Provinsi, Nopian Andusti, SE, MT saat

diminta tanggapan terkait polemik bantuan keuangan dari Pemprov Bengkulu ke Kabupaten BS, kemarin (26/6).

Bila hasil pemeriksaan BPK bahwa pekerjaan proyek tersebut merupakan utang provinsi maka Pemprov siap membayar pekerjaan para kontraktor ini. Sebaliknya kalau

menurut BPK itu merupakan utang kabupaten maka Pemkab BS yang harus membayarnya. "Kita tunggu hasil pemeriksaan BPK dulu," terang Nopian usai menghadiri pelantikan Penjabat Sekda BS di Gedung Repitaloka Kantor Bupati BS.

Terpisah perwakilan kontraktor, Hendra Lapino me-

negaskan bahwa kontraktor menuntut pembayaran pekerjaan mereka tahun lalu kepada Pemkab BS. Lantaran kontraktor hanya tahu jika pekerjaan mereka selesai, maka sudah seharusnya para kontraktor mendapatkan hak atas pekerjaan tersebut.

"Kami tidak tahu sumber uangnya dari Pemprov

atau dari mana. Yang kami tahu kontrak di Pemkab artinya itu tanggung jawab Pemkab. Juga sebelumnya bupati, ketua DPRD sudah membuat pernyataan bersedia membayar dalam APBD-P," tukas Hendra.

Hendra kembali mengingatkan agar pada saat pembahasan APBD Perubahan, pembayaran utang Pemkab

ke kontraktor dapat diprioritaskan dan dianggarkan. Supaya ada kepastian hak para kontraktor BS ini dibayarkan dalam tahun ini. "Kita mau hak kita dibayarkan tahun ini, dianggarkan dalam APBD-P Kabupaten BS. Itu hak kita kontraktor, dan kita juga perlu membayar utang," tandasnya. (key)